BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Kepulauan Senkaku/Diaoyu

4.1.1.1.1 Letak Geografis

Kepulauan Senkaku/Diaoyu terletak di Laut Tiongkok Timur sekitar 400 km sebelah barat dari Okinawa dan 170 km sebelah timur laut dari Taiwan. Ketinggian kepulauan bervariasi, titik tertinggi adalah Uotshuri/Diaoyu sekitar 383 meter dan yang terendah adalah Dananxiao Dao memiliki ketinggian 13 meter. Secara kasat mata Kepulauan Senkaku/Diaoyu memang hanya sebuah kepulauan kecil yang tidak berpenghuni, hanya terdiri dari pulau-pulau kecil dan dibalik itu semua Kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki potensi yang sangat besar. Wilayah sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah wilayah yang kaya akan hasil sumber daya alam yaitu minyak dan gas alam. Dalam catatan Tiongkok pada abad ke-14 Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan titik navigasi penting pada rute maritim antara pesisir Tiongkok dan Ibukota kerajaan Ryukyu di Jepang.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu terdiri dari 5 Kepulauan dan 3 batu karang yang dimana memiliki nama dari bahasa Jepang dan Tiongkok, Kepulauan Senkaku/Diaoyu serta batu karang tersebut berkumpul mengelilingi satu pulau yang terbesar yang bernama pulau Uotshuri/Daioyu, dan total luas Kepulauan Senkaku/Diaoyu sendiri adalah 8 hektar serta daratan Kepulauan Senkaku/Diaoyu

adalah 7 km persegi (*www.globaldefence.net/artikel_analysen/artikel_analysen/Senkaku_diaoyu-inseln_18_34.html* Diakses pada 29 Juni 2015).



Sumber: Analisis Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu *www.globaldefence.net/artikel_analysen/artikel_analysen/Senkaku_diao yu-inseln_18_34.html* Diakses pada 29 Juni 2015

Gambar 4.1

Peta Kepulauan Senkaku/Diaoyu

Kepulauan Senkaku/Diaoyu termasuk ke dalam delapan pulau yang tidak berpenghuni yang terletak di perairan Laut Tiongkok Timur, kepulauan tersebut berada pada 330 km dari Republik Rakyat Tiongkok, 170 km dari Pulau Ishigaki (Jepang), 410 km dari Okinawa Jepang 170 km dari Taiwan. Garis koordinat 25°47′53″ Lintang Utara dan 124°03′21″ Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km2 (*http://www-ibru.dur.ac.uk/resources/docs/senkaku.html* /di akses pada 29 Juni 2015).

Tabel 4.1
Kepulauan Senkaku/Diaoyu

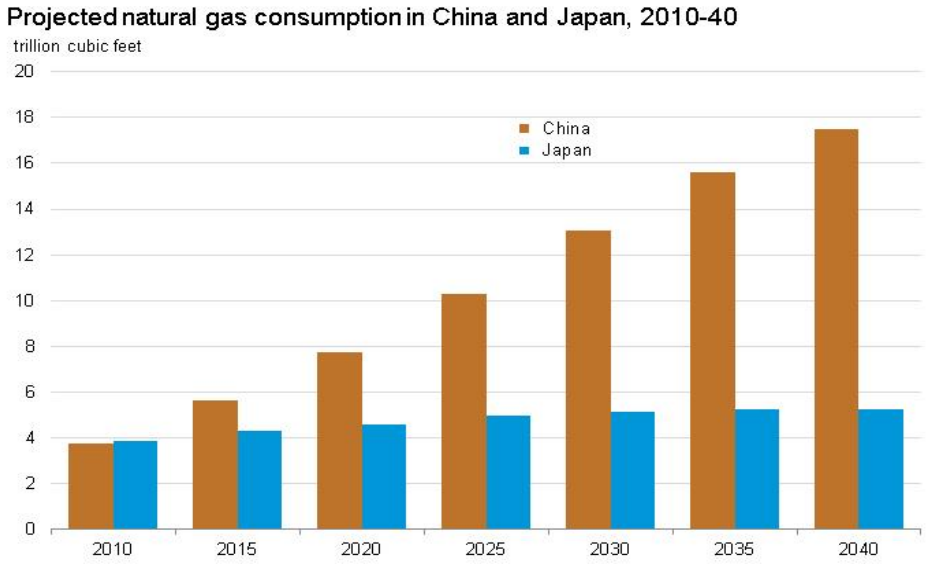
Nama Jepang	Nama Tiongkok
Uotshuri-shima	Daioyu Dao
Kuba shima	Huangwei Yu
Minami Kojima	Nanxiao Dao
Kita Kojima	Beixiao Dao
Taisho-jima	Chiwei Yu
Okino Kitaiwa	Dabeixiao Dao
Okino Minamiiwa	Dananxiao Dao
Tobise	Feilai Dao

Sumber: Olahan Peneliti dari *http://www-ibru.dur.ac.uk/resources/docs/senkaku.html* Diakses pada 29 Juni 2015

4.1.1.1.2 Nilai-nilai Strategis

Sumber daya alam memiliki manfaat yang sangat banyak bagi setiap negara yang ada di dunia dan salah satu manfaatnya adalah sebagai penghasil devisa yang sangat besar seperti halnya yang dialami oleh negara-negara besar dan selain itu yang paling penting dalam sumber daya alam juga berguna untuk memenuhi kebutuhan sumber daya energi suatu negara apalagi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi yang memiliki kegunaan serta manfaat yang sangat besar bagi setiap manusia dan juga negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh negara manapun yang ada di muka bumi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang paling dibutuhkan dimuka bumi ini.

Jepang dan Tiongkok merupakan negara besar di kawasan Asia Timur, kedua negara tersebut memiliki kemajuan disegala bidang baik di bidang pertahanan militer maupun dibidang perindustrian. Sebagai dampak dari kemajuan Jepang dan Tiongkok membuat meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam khususnya sumber daya alam minyak dan gas. Kedua negara baik Jepang maupun Tiongkok memiliki ketergantungan minyak dan gas dari impor. Dengan demikian sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu akan sangat menentukan strategi dan jaminan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas Jepang maupun Tiongkok dimasa depan (http://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS / di akses pada 3 Agustus 2015).



Sumber: http://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS di akses pada 3 Agustus 2015

Gambar 4.2

Kebutuhan Energi Jepang-Tiongkok

Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan 5 kepulauan dan 3 karang yang memiliki banyak kandungan minyak bumi dan gas alam. Kekayaan yang dimiliki

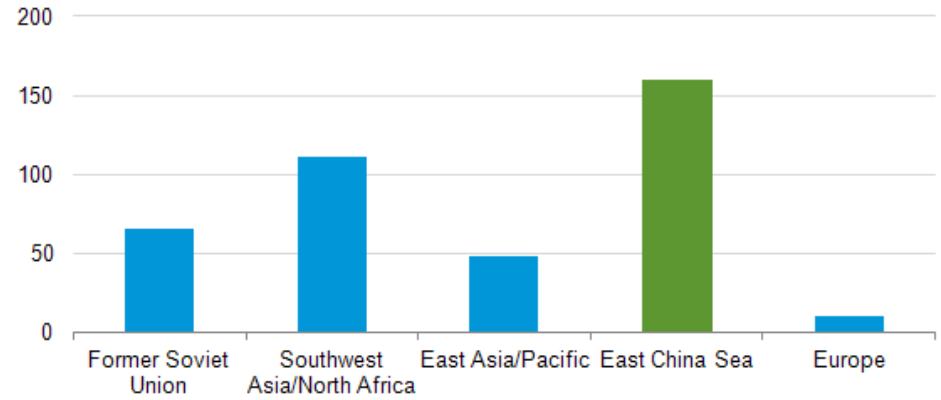
kepulauan Senkaku/Diaoyu yang diteliti oleh beberapa peneliti dan berbagai institusi terungkap kekayaan alam tersebut yang menimbulkan sengketa antara Jepang dan Tiongkok.

Laut Tiongkok Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama gas alam yang dimana wilayah ini belum di eksplorasi baik Jepang maupun Tiongkok. Jepang dan Tiongkok sebagai konsumsi energi terbesar di Asia, keduanya sangat tertarik menggunakan gas alam yang ada di Laut Tiongkok Timur untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sengketa teritorial yang belum terselesaikan membuat eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam ini tidak tercapai.

Tiongkok merupakan konsumen energi terbesar di dunia dan pengimpor minyak kedua setelah Amerika Serikat. Dengan kebutuhan yang besar tersebut Tiongkok sekarang menjadi pengimpor gas alam sehingga memerlukan pasokan baru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Tiongkok. Sedangkan Jepang merupakan pengimpor ketiga terbesar minyak mentah dan gas alam. Jepang diperkirakan akan terus bergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masa depan (http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN /di akses pada 5 Agustus 2015).

Laut Tiongkok Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama gas alam dan minyak bumi. Jepang dan Tiongkok merupakan konsumen terbesar dalam gas dan minyak bumi. Kedua negara mengklaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam Kepulauan/Senkaku/Diaoyu.

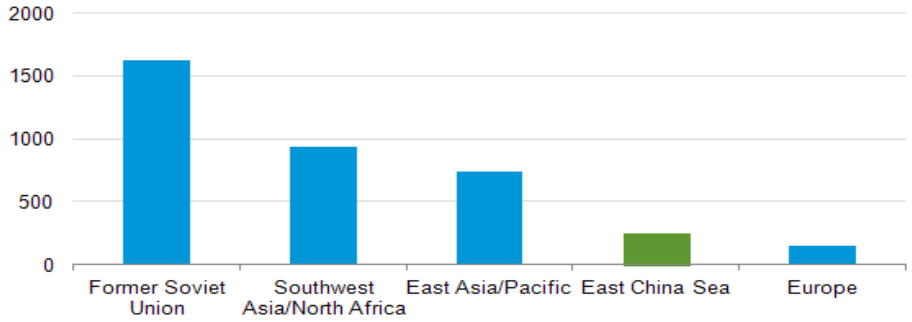
Dalam laporan *U.S Energy Information Administration* diperkirakan dalam wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu mengandung 60-100 juta barel dan 1-2 miliyar kubik cadangan gas alam. Diperkirakan masih banyak yang belum ditemukan cadangan minyak dan gas di wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu (http ://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id =8270 /di akses pada 7 Agustus 2015).



Sumber: *Energy Information Administration http://www.eia.gov /todayinenergy/detail.cfm?id=8270 di akses pada 7 Agustus 2015*

Gambar 4.3

Gas Alam Dalam Jutaan Kubik



Sumber: *Energy Information Administration http://www.eia.gov /todayinenergy/detail.cfm?id=8270 di akses pada 7 Agustus 2015*

Gambar 4.4

Minyak Mentah Dalam Miliaran Barel

Kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki nilai strategis baik secara geografi, politik, ataupun ekonomi. Nilai strategis kepulauan Senkaku/Diaoyu dapat dilihat dari letak kepulauan tersebut yang menghubungkan negara Asia Pasifik dengan Asia Tenggara. Letak yang strategis tersebut juga dapat menjadikan kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai basis militer negara yang memilikinya. Secara politik kepulauan Senkaku/Diaoyu dapat digunakan untuk memperluas pengaruh Tiongkok di wilayah Asia Tenggara dan Laut Tiongkok Timur serta dapat memperkuat legitimasi atas Taiwan. Sedangkan secara ekonomi kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki kandungan sumber daya alam yang diperkirakan akan dapat membantu untuk kemajuan suatu negara (http://www.wilayahperbatasan.com/wilayah-perbatasan-konflik-perebutan-kedaulatan-pulau-senkaku/ di akses pada 8 Agustus 2015).

4.1.1.2 Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu

Sejak 1970-an sengketa antara Jepang dan Tiongkok meningkat, Jepang mengatakan bahwa Tiongkok mengklaim atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu setelah hasil laporan dari *United Nations Economic Commission for Asia and the Far East* (UNICAFE) pada (1968-1969) yang ditemukan bahwa di wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu ditemukan ada kandungan minyak dan gas, namun Tiongkok berpendapat bahwa Kepulauan tersebut secara historis merupakan bagian dari Tiongkok dan menyebutkan Jepang secara ilegal telah mengklaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Pada tahun 1978, anggota *Japanese Youth Association*, yaitu kelompok aktivis Jepang membangun mercusuar di Kepulauan Senkaku/Diaoyu. aksi ini menuai protes dari Tiongkok. Sekitar 100 kapal nelayan Tiongkok berlayar mendekati kepulauan tersebut. Sebagian dari kapal-kapal tersebut diduga membawa senjata. Protes yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok tidak membuat aktivis Jepang mundur dalam usahanya mempertahankan Kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu (http://www.preceden.com/timelines/35924-senkaku-diaoyu-diaoyutai-island-conflict /Diakses pada 2 Juli 2015).

Tahun 2002 Kementerian Dalam Negeri Jepang menyewa tiga pulau yang dimiliki oleh Kurihara, sementara kepulauan lainnya disewa oleh Kementerian Pertahanan. Tahun 2003 Tiongkok menegaskan klaim mereka atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu melalui media dan aksi-aksi protes. Pada tanggal 22 Juni 2003 beberapa kelompok aksi protes dari Tiongkok berusaha mendara di Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan menggunakan sebuah kapal kecil, kapal tersebut tidak berhasil mencapai Kepulauan Senkaku/Diaoyu, dalam pandangan Jepang dengan adanya kapal kecil tersebut sehingga melanggar teritorial perairan Jepang dengan demikian *Japanese Coast Guard* mengambil tindakan yang sesuai untuk mengeluarkan mereka dari teritorial perairan Jepang (http://www.japantimes. co.jp/news/2003/01/06/national/china-lodges-protest-over-senkaku-lease/ di akses pada 2 Juli 2015).

Tanggal 24 Maret 2004 tujuh aktivis Tiongkok untuk pertama kalinya mencapai Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Namun petugas dari pasukan patroli Jepang dengan segera menahan aktivis tersebut. penahanan tersebut tidak

berlangsung lama karena Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi periode (2001-2006) memerintahkan untuk mendeportasi mereka setalah dua hari ditahan oleh Jepang (http://www.mofa.go.jp/announce/press/2004/3/0326.html di akses pada 3 Juli 2015)

Dalam laporan yang diterima oleh pasukan patroli Jepang Pada tanggal 7 September 2010, bahwa dalam wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu terlihat kapal nelayan Tiongkok yang sedang mengambil ikan disekitaran kepulauan tersebut. Pasukan patroli Jepang menganggap kapal-kapal tersebut ilegal dan telah melanggar kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Tiongkok berpendapat bahwa insiden tabarakan kapal Tiongkok dengan kapal patroli Jepang akhirnya terjadi, dalam hal ini kapal patrol Jepang melakukan tindakan yang agresif terhadap kapal nelayan Tiongkok yang dimana awak kapal dipukul dan pasukan patroli Jepang merusak kapal nelayan tersebut. Tetapi dalam pemaparan kapal patroli Jepang bahwa mereka menemukan 15 nelayan kapal Tiongkok dan satupun dari mereka terluka akibat tindakan Jepang yang dituduhkan oleh Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Jepang mengajukan protes kepada Tiongkok melalui kedutaan besar Tiongkok untuk Jepang. Pemerintah Jepang menganggap bahwa penangkapan kapal ikan Tiongkok di wilaya Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan ilegal karena telah memasuki wilayah Jepang (http://islandstudies.oprf-info.org/research/a00005/ di akses pada 27 Juli 2015)

Situasi di wilayah Laut Tiongkok Timur semakin meningkat yang dimana Tiongkok menerepkan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) pada 23 November 2013. Tiongkok berhak untuk mendapatkan laporan atas penerbangan yang

melintasi wilayah Tiongkok. Pemberlakukan ini menimbulkan akibat ancaman keamanan di wilayah Asia Timur yang memungkinkan Tiongkok mengambil tindakan militer atas objek yang dianggap musuh. Jepang menganggap pemberlakukan ADIZ Tiongkok telah menciptakan situasi yang tidak menguntungkan untuk Jepang, sehingga jepang telah bergeser kebijakan strategi keamanan dengan menjadi mitra Amerika Serikat dengan membuat Tiongkok sebagai musuh bersama. Dalam mengumumkan pembentukan ADIZ, Tiongkok memperingatkan bahwa setiap pesawat komersil memasuki wilayah Tiongkok tanpa pemberitahuan bisa menghadapi langkah-langkah defensif yang akan dilakukan oleh Tiongkok (http://www.japantimes.co.jp/news/2013/11/29/asia-pacific/china-sends-warplanes-over-new-air-zone-in-east-china-sea/#.VbhRIrXv_Dd /di akses pada 2 Juli 2015).

Dalam beberapa dekade Laut Tiongkok Timur telah menjadi isu utama dalam pertentangan antara Jepang dan Tiongkok. Dua negara tersebut memiliki klaim yang bertentangan melalui klaim masing-masing negara atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Eskalasi konflik semakin meningkat setelah pemebelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang pada 2012. Tiongkok bereaksi keras untuk langkah yang dilakukan oleh Jepang atas pembelian kepulauan tersebut, sehingga situasi semakin meningkat yang menyebabkan aksi demonstrasi terjadi diseluruh kota di Tiongkok dan Kapal Jepang serta kapal-kapal pengintai Tiongkok terus waspada di perairan dekat Kepulauan Senkaku/Diaoyu (Baruah, 2013: 1-2).

Sebelumnya Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda mengatakan pemerintahnya sedang dalam negosiasi untuk membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan menjadikannya di bawah kepemilikan publik. Inisiatif pembelian tersebut muncul pada bulan April oleh Gubernur Tokyo Shitaro Ishihara untu mengumpulkan uang demi membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Langkah ini memicu siklus baru ketegangan antara Jepang dan Tiongkok.

Seperti dilansir oleh *The Financial Times* pada tanggal 7 Juni 2012, Duta Besar Jepang untuk Tiongkok Uichiro Niwa mengatakan bahwa mengecam keras rencana Gubernur Ishihara untuk membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa pembelian kepulauan tersebut dapat mengakibatkan krisis sengketa yang serius, dalam hubungan ekonomi dan hubungan bilateral Jepang-Tiongkok sangat baik sebelumnya. Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Genba menegur Mr. Niwa atas pernyataan tentang pandangan pribadinya yang berbeda dari sikap pemerintah Jepang. Mr Genba mengatakan bahwa perubahan kepemilikan adalah masalah dalam negeri yang tidak menyangkut masyarakat internasional, klaim Jepang untuk kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu jelas sah di bawah hukum internasional (http://www .japantimes.co.jp/opinion/2012/07/03/editorials/show-restraint-over-senkaku-islan ds/#.VbYwLbXv_Dd di akses pada 2 Juli 2015).

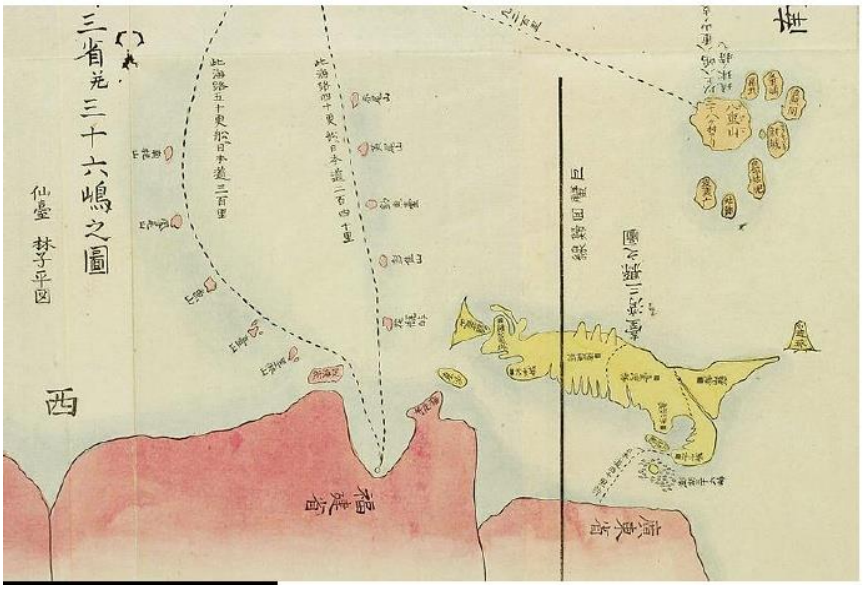
Tahun 2012 merupakan waktu di mana eskalasi konflik kembali terjadi pada bulan Juli 2012. Perdana menteri Yoshihoko Noda mengatakan bahwa pemerintah pusat Jepang mengadakan pembicaraan untuk membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu dari keluarga Kurihara. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012

aktivis Tiongkok mencapai Kepulauan Senkaku/diaoyu yang disengketakan untuk pertama kalinya sejak 1996. Lima hari berikutnya yaitu tanggal 19 Agustus 2012 sepuluh orang aktivis Jepang berenang dan menaikkan bendera Jepang di gugusan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Ketegangan semakin meningkat pada saat langkah Jepang membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada September 2012 dari keluarga Kurihara sebesar 2,05 milyar Yen (http://www.stimson.org/about/news/expert-brief-yuki-tatsumi-on-japan-china-tensions-over-senkakudaoyutai-islands/ di akses pada 3 Juli 2015).

4.1.1.2.1 Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu Dalam Pandangan Jepang

Potensi konflik terbuka antara Jepang dan Tiongkok semakin meningkat dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dimana baik Jepang maupun Tiongkok mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu masuk dalam teritorial mereka. Sekitar tahun 1879 Kepulauan Ryukyu resmi menjadi salah satu dari bagian Prefektur Okinawa. Kemudian pada tahun 1880 untuk pertama kalinya Kepulauan Senkaku/Diaoyu dimasukkan kedalam peta teritorial Jepang. Pada tahun 1884 Tatsuhiro Koga penduduk asli dari prefektur Fukuoka yang hidup di Naha sejak 1879. Koga mengisi hidupnya dengan menangkap dan mengeksplorasi hasil laut yang didapatkan serta manangkap elang laut di wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Koga membangun usaha dengan menjual bulu elang yang didapatkanya sehingga pada peperangan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok pada tahun 1894, Tatsuhiro Koga meminta kepada Pemerintah Meiji untuk melindungi dan menjamin tempat usahanya di Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Pada tahun 1885 Kepulauan Senkaku/Diaoyu dianggap tidak dimiliki oleh Jepang maupun Tiongkok. Jepang memiliki klaim secara dokumen resmi yang berpendapat bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu milik Jepang sejak tahun 1885. Jepang menganggap bahwa kedudukannya di Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah mutlak karena sejak dahulu Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah bagian dari Kepulauan Ryukyu dibawah kerajaan Ryukyu yang dianeksasi Jepang pada tahun 1875 (*http://japanfocus.org/-Gavan-McCormack/3464/article.html* Diakses pada 5 Juli 2015).



Sumber*: http://japanfocus.org/-Gavan-McCormack/3464/article.html* Diakses pada 5 Juli 2015

Gambar 4.5

Peta Senkaku/Diaoyu 1875

Kepulauan Senkaku/Diaoyu secara sejarah tidak menjadi wilayah yang diperebutkan secara intensif sebelumnya, wilayah ini bisa dikatakan sebagai batas

wilayah Formosa (sekarang Taiwan) dengan Kepulauan Ryukyu hingga tahun 1875, dimana sejak 1372 hingga 1875 di Kepulauan Ryukyu sendiri terdapat negara independen yang berada di bawah perlindungan kekaisaran Ming (Tiongkok).

Midorima Sakae seorang sarjana Jepang menulis sebuah buku berjudul Senkaku Retto, dimana ia menceritakan kisah karir Tatsuhiro Koga yang berasal dari prefektur Fukuoka. Dalam buku ini ia mengklaim Koga telah tinggal di Naha sejak 1879 dan pergi pada beberapa misi eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan tempat baru dalam melaksanakan bisnisnya penangkapan elang dan mengeksplorasi hasil laut. Koga mencapai Kuba-shima salah satu Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada tahun 1884 dan menemukan banyak bulu elang di kepulauan tersebut, kemudian Koga bermaksud untuk menjalankan bisnis di Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Dalam hal ini Jepang berdasarkan klaim historisnya bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah ditemukan pada tahun 1885 tidak berpenghuni dan tidak adanya tanda-tanda kepemilikan dari Tiongkok, oleh karena itu Jepang kemudian menduduki Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan memilikinya. Klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku didasari atas sumber-sumber sejarah Jepang yang ada dalam peta Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dimana Jepang berhak atas kepulauan tersebut.

Sejak awal sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu pemerintah Jepang tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki senketa wilayah dengan Tiongkok. Jepang berpendapat bahwa penggabungan Kepulauan yang disengketakan pada

tahun 1895 adalah sah dan legal milik Jepang karena berdasarkan survei yang dilakukan Jepang pada tahun 1885 yang dilakukan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga Prefektur Okinawa menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah dihuni oleh masyarakat Jepang dan tidak menunjukkan jejak keberadaan dari Dinasti Qing. Berdasarkan konfirmasi ini pemerintah Jepang membuat keputusan kabinet pada tanggal 14 Januari 1895 untuk mendirikan sebuah penanda di Kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk secara resmi menggabungkan Kepulauan Senkaku/Diaoyu ke dalam wilayah Jepang (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/basic _view.html/ di akses pada 7 Juli 2015).

Pada tanggal 14 Januari 1895 pemerintah Jepang melakukan langkah awal untuk memiliki Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan menyatakan dan memasukan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai wilayah teritorial Jepang. Sejak saat itu Jepang menganggap Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari Nansei Shoto yang merupakan salah satu wilayah teritorial Jepang. Sehingga dapat dikatakan bahwa Jepang adalah negara yang pertama kali mengklaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai salah satu bagian dari wilayahnya (http://www.mof a.go.j p/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html di akses pada 5 Juli 2015).

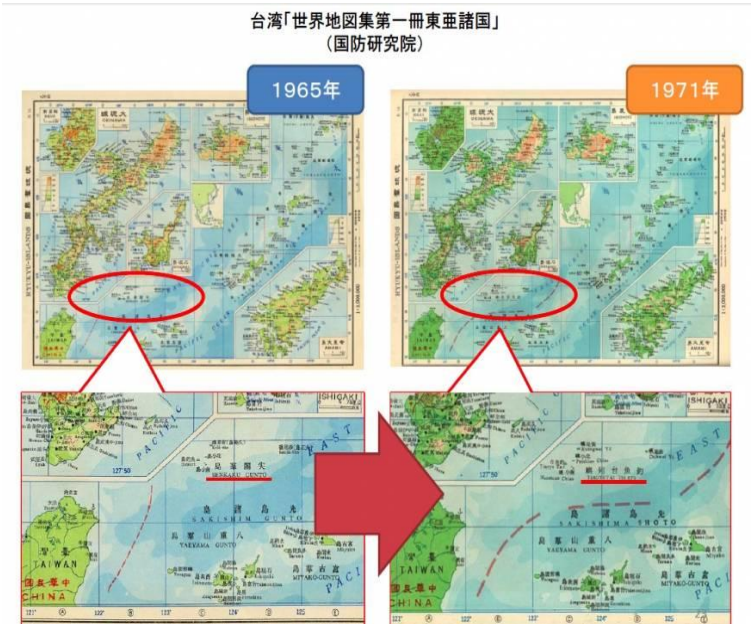
Berdasarkan data tersebut bahwa Jepang telah mendeklarasikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari wilayahnya. Hal ini merupakan usaha nasionalisasi Kepulauan Senkaku oleh pihak Jepang kepada pihak internasional bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah milik Jepang dan bagian dari wilayah yang harus di pertahankan dan dilindungi dari pihak luar. Setelah Jepang

menyerah pada tahun 1945, Pemerintah Amerika Serikat mengambil kontrol atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Pemerintah Jepang juga berpendapat bahwa sejak Kepulauan Senkaku/Diaoyu menjadi salah satu bagian dari wilayah Nansei Shoto, Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Tiongkok. Oleh sebab itu Kepulauan Senkaku tidak termasuk ke dalam bagian dari perjanjian San Francisco 1952.

April 1952 yang ditetapkan hukum wilayah Jepang setelah Perang Dunia II. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa Tiongkok menerima kenyataan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu masuk dalam wilayah Jepang, tetapi setalah PBB menerbitkan laporan yang menunjukkan kemungkinan cadangan energi di lepas pantai Senkaku/Diaoyu Tiongkok beralih sikap menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah milik Tiongkok (http://islandstudies.oprf-info.org/research/a00004/ di akses pada 5 Juli 2015).

Pada tahun 1969 Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menerbitkan peta di dalam situsnya, hal ini membuat pemerintah Jepang merasa benar apa yang telah di publikasikan oleh Tiongkok dalam website pemerintahan Tiongkok. Peta tersebut memperlihatkan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu masuk dalam wilayah Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa menempatkan peta pada website ini bertujuan untuk menunjukkan Jepang secara historis Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan bagian dari wilayah Jepang. Ini menunjukkan bahwa klaim Tiongkok atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak memiliki landasan sama sekali atas apa yang Tiongkok bicarakan dalam media maupun dengan bukti sejarah yang di keluarkan oleh pemerintah Tiongkok.

Dalam situs ini menunjukan dua peta yang diambil dari buku teks geografi Taiwan digunakan pada tahun (1970-1971) dengan mengacu pada Kepulauan Senkaku/Diaoyu, kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei menentang Kementerian Luar Negeri Jepang bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak dapat dibantahkan bahwa beberapa peta tidak dapat membatalkan bukti-bukti sejarah kepemilikan Tiongkok atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu, klaim Tiongkok dalam hal ini dapat dibantahkan dengan sumber data-data yang pernah dikeluarkan oleh website pemerintah Tiongkok (http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/17/national/politics-diplomacy/foreign-ministrys-1969-china-map-identifies-senkaku-islands-by-japanese-name/#.VbhD_LXv_Df/di akses pada 7 Juli 2015)



Sumber: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/17/national/politics-diploma cy/foreign-ministrys-1969-china-map-identifies-senkaku-islands-by-japanese-nam e/#.VbhD_LXv_Df /di akses pada 7 Juli 2015

Gambar 4.6

Peta Kepulauan Senkaku/Diaoyu 1965 dan 1971

4.1.1.2.2 Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu Dalam Pandangan Tiongkok

Pemerintah Jepang membenarkan klaim kedaulatanya atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan menggunakan hukum internasional mengenai hukum wilayah yang tidak berpenghuni. Hukum internasional memberikan dukungan pada posisi Jepang karena merupakan prinsip yang ditetapkan dalam hukum internasional bahwa kedaulatan membangun atas wilayah yang tidak berpenghuni. Tiongkok berpendapat bahwa semua argumen Jepang benar-benar tidak valid dan tidak dapat diterima.

Dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu Tiongkok menunjukan dokumentasi kuno pada masa Dinasti Ming (1368-1644) yang menunjukan dokumentasi bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu masuk ke dalam wilayah Tiongkok (1644-1911). Menurut Tiongkok catatan sejarah Kepulauan Senkaku/Diaoyu digunakan untuk alat bantu navigasi nelayan Tiongkok dan basis operasional. Salah satu catatan penting dari Tiongkok adalah pada tahun 1893 sebelum klaim Jepang janda Kaisar Cixi (Tsu Hsi) dari Qing mengeluarkan dekrit kekaisaran dimana dia dianugrahi Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Tiongkok berpendapat bahwa selama beberapa abad sebelum klaim Jepang Kepulauan Senkaku/Diaoyu berada dibawah administrasi Tiongkok dan sebagai bagian dari Taiwan (Pan, 2007: 77-80).

Pada tahun 1372 kerajaan Ryukyu merupakan wilayah sungai dari Dinasti Ming dan dalam lima ratus tahun kedepan membayar upeti kepada kaisar Tiongkok. Sekitar 1372-1879 dua puluh empat misi penobatan dikirim oleh

Kaisar Tiongkok ke Kerajaan Ryukyu untuk tujuan gelar formal kepada Zhongshan Wang sebagai raja Zhongshan. Para utusan Tiongkok selalu menyimpan catatan tentang misi mereka dalam perjalanan ke Kerajaan Ryukyu yang kemudian disampaikan kepada Kaisar Tiongkok. Catatan navigasi Tiongkok berjudul *Fair Winds for Escort* pada tahun 1403, dalam catatan itu mengidentifikasi kepulauan yang disengketakan dalam rute kompas untuk navigasi Tiongkok dan mengarahkan untuk mencapai ke Kerajaan Ryukyu (Yu, 2013:19-23).

Aneksasi Jepang terhadap Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak berdasarkan data-data yang berdasarkan penemuan penduduk melainkan konsekuensi dari perang Tiongkok-Jepang pada 1894-1895 yang dimana kekalahan Tiongkok pada perang tersebut yang memberikan wilayahnya kepada Jepang. Dalam dokumen resmi Meiji ambisi pemerintah Jepang dalam Kepulauan Senkaku/Diaoyu dimulai pada tahun 1885 yang dimana Menteri Dalam Negeri Jepang Yamagata Aritomo memerintahkan gubernur Okinawa Nishimura Sutezo untuk mendirikan sebuah mercusuar di wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu, namun Nishimura melaporkan dalam survei yang dilakukan Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah lama di temukan oleh Tiongkok dan dokumen resmi telah disimpan oleh Tiongkok. Pemerintah Jepang telah menyatakan dari tahun 1885 telah melakukan survei di Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah berulang kali dilakukan oleh pemerintah Jepang melalui Prefektur Okinawa. Melalui survei ini Jepang menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak berpenghuni dan tidak menunjukan jejak dari Dinasti Qing, namun Tiongkok berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak akurat dan dapat

dibantah berdasarkan dokumen resmi Meiji 1885-1895 yang disimpan sebagai arsip nasional Jepang (http://defence.pk/threads/diaoyutais-history-and-status-quo-our-diaoyutai-islands.387292/ Diakses pada 8 Juli 2015).

4.1.1.3 Pandangan Internasional Terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu

Wilayah Asia Timur merupakan ruang maritim yang paling diperdebatkan di dunia, berbagai permasalahan dalam sengketa teritorial menjadi isu yang menarik untuk kalangan penstudi hubungan internasional dalam regional Asia Timur. Berbagai permasalahan yang saling berbeda pendapat tentang garis pangkal laut sampai sengketa kedaulatan teritorial atas kepulauan Senkaku/Diaoyu yang tak berpenghuni untuk mendukung klaim masing-masing negara.

Dalam satu dekade isu krisis keamanan dan politik di kawasan Asia Timur merupakan bahan pembicaraan utama yang ramai dibicarakan oleh masyarakat internasional. Kawasan laut Tiongkok Timur merupakan area strategis yang mempertemukan Jepang, Tiongko dan Korea Selatan. Kawasan ini memiliki rantai kepulauan yang kini menjadi objek sengketa antara Jepang dan Tiongkok. Kepulauan Senkaku/Diaoyu menjadi titik panas hubungan antara Jepang dan Tiongkok. Situasi memanas terutama setelah pemerintah Jepang membeli tiga kepulauan Senkaku/Diaoyu dari Kurihara.

Pada serangkaian masalah di Laut Tiongkok Timur peran negara-negara sahabat baik Jepang maupun Tiongkok sangat berpengaruh dari serangkaian

sengketa yang terjadi di Kepulauan Senkaku/Diaoyu. dalam spekulasi yang mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia mengadakan perjanjian mengenai sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Pada pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Tiongkok Xi Jingping yang mengangkat rasa ingin tahu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dimana mengingat ketegangan antara Tiongkok dan Jepang. Langkah Rusia yang tidak ingin ikut campur dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu memberikan ketenangan untuk Jepang. Langkah yang diambil Rusia sangat sulit untuk mendukung Tiongkok karena Rusia sedang menjalin hubungan yang baik dengan Tiongkok maupun dengan Jepang yang dimana Rusia sedang menjalankan investasi di Jepang dalam pembangunan *Far East* (http://www.defenseone.com/ideas/2014/03/why-russia-and-china-wont-join-forces-over-di sputed-islands/80080/?oref=d-interstitial-continue?oref=d-interstitial-continue /diakses pada 10 Juli 2015).

Dalam pernyataan Shinzo Abe pada tahun 2013 yang menyatakan tidak menginginkan ada perubahan pada status quo mengenai kekuatan di kawasan Asia Timur. Dalam hal ini merupakan sudut pandang Jepang terhadap Tiongkok. Sedangkan Tiongkok sendiri menghawatirkan kekuatan Jepang yang sangat dominan di masa 1990-an. Sampai akhirnya Tiongkok meningkatkan kapabilitas militernya untuk mengimbangi kekuatan Jepang. Dalam masalah yang terjadi Jepang yang proaktif dalam keamanan membuat kekahwatiran pemerintah Jepang melihat kapabilitas kekuatan militer Tiongkok. Hal ini membuat Tiongkok menginginkan agar masalah sengketa wilayah ini tidak mengganggu hubungan

bilateral antara Jepang-Tiongkok (http://defence.pk/threads/diaoyutais-history-and-status-quo-ourdiaoyutai-islands.387292/ di akses pada 25 Juli 2015).

Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha melawan kemarahan negara-negara Asia-Pasifik dalam beberapa sengketa kepulauan dengan Tiongkok. Dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu Jepang memiliki pandangan sendiri tentang status kepulauan tersebut karena pendapat Jepang Kepulauan Senkaku/Diaoyu bukan sebagai wilayah sengketa melainkan wilayah Jepang dalam hukum internasional dan sumber data yang valid. Jepang dalam pandangan internasional selalu dikaitkan dengan permasalahan pada saat penjajahan Jepang di beberapa negara di Asia Timur. Hal ini dalam Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan bahwa Jepang mengedepankan proaktif dalam perdamaian sehingga menjadikan Jepang sebagai bangsa yang telah menghilangkan budaya perang dari pandangan Internasional.

Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya menyatakan keprihatinan tentang interpretasi Abe yang mengizinkan militer Jepang yang dikenal sebagai pasukan bela diri untuk memperluas fungsinya menjadi pasukan negara Jepang yang dalam hal ini negara-negara di Asia akan berpikir tentang sejarah Jepang pada saat perang dunia II. Shinzo Abe juga menegaskan dalam pidatonya menginginkan Jepang menjadi anggota tetap PBB yang memegang hak Veto Dewan Keamanan PBB seperti Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia dan Amerika (http://www.nytimes.com/2014/09/26/world/asia/in-un-talk-japan-leader-makes-pitch-to-neighbors.html?_r=0 / Diakses pada 14 Juli 2015).

Secara umum kebijakan Amerika Serikat di Asia Timur dalam sisi politik dan keamanan merupakan fokus dari kepentingannya di Asia-Pasifik, kawasan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang paling dinamis sehingga pernah dijuluki sebagai "Keajaiban Ekonomi Asia Timur" meskipun kini terhambat oleh krisis dalam hal kemananannya. Secara ekonomis Asia Timur masuk dalam jaringan ekonomi pasar dunia yang merupakan dasar dari ekonomi pasar yang mendasarkan kepada sistem ekonomi kapitalis global.

Posisi geografis menunjukan bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan Asia Pasifik, maka Amerika Serikat meletakkan kawasan ini sebagai perioritas penting di dalam agenda kebijakan nasionalnya. Hal ini berarti bahwa makna strategis Asia Timur bagi Amerika Serikat diterapkan baik secara *common sense* maupun konteks kepemimpinan Amerika Serikat di dalam hubungan luar negeri dengan Asia. Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan Jepang merupakan tonggak utama bagi kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur maupun Asia-Pasifik secara keseluruhan. Jepang menjadi begitu penting dari segi ekonomi, politik, teknologi dan keamanan. Untuk kepengtingan komprehensif terhadap Jepang dan Asia Timur, Traktat Kerjasama Keamanan Bilateral antara Amerika Serikat-Jepang merupakan dasar bagi hubungan itu.

Tiongkok merupakan negara ekonomi terbesar di kawasan Asia Timur, dengan kekuatan ekonominya Tiongkok mengembangkan kekuatan militernya untuk menghadapi ancaman kemanan nasional di dalam teritorialnya. Tingkok telah menegaskan klaim teritorialnya terhadap Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjadi persengketaan antara Jepang dan Tiongkok. Kepentingan Amerika

Serikat dalam persengketaan Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan kepentingan dalam hal ekonomi dimana Amerika Serikat berusaha menegakkan norma-norma global dalam hal kebebasan navigasi dan resolusi konflik damai (http://www. japantimes.co.jp/opinion/2015/06/04/commentary/japan-commentary /u-s-should-stay-out-of-asian-countries-territorial-disputes/#.VbpPa7Xv_D/ di akses pada 15 Juli 2015).

Kepulauan Senkaku/Diaoyu termasuk dalam teritorial Zona Ekonomi Eksklusif Laut Tiongkok Timur, dengan demikian terjadi tumpang tindih klaim antara Jepang dan Tiongkok. Menurut pasal 74 dalam *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS), penentuan Zona Ekonomi Eksklusif antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai solusi yang adil. Jika persetujuan tersebut tidak dapat dicapai, maka negara-negara terkait harus menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh bagian XV konvensi (http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos /part5.htm / di akses pada 24 Juli 2014).

Mengenai paham garis pangkal dalam pandangan Jepang dan Tiongkok memang tidak sesuai dengan isi konvensi, karena jika sudah berkaitan dengan hal kedaulatan, keputusan yang bersifat sepihak tidak mempunyai basis yang legal. Pakar hukum laut dari Tiongkok Ji Guoxing menegaskan bahwa pengambilan garis tengah untuk pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinental seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antar kedua pihak agar tercapai solusi yang adil, selanjutnya pengukuran wilayah garis tengah hanya sebuah cara

pengukuran, bukan sebuah perinsip dari hukum internasional kebiasaan dalam delimitasi. Hal ini yang membuat Jepang dan Tiongkok tidak dapat menemukan titik permasalahan yang terjadi dalam Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu sehingga penguatan tentang klaim masing-masing berdasarkan bukti-bukti dari sejarah yang ada.

4.1.1.4 Hubungan Jepang-Tiongkok

Jepang dan Tiongkok merupakan salah satu hubungan yang paling penting yang berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi, keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Timur. Hubungan ekonomi antara Jepang dan Tiongkok secara signifikan telah melihat pertumbuhan yang sangat pesat dalam perdagangan dan investasi. Tiongkok berpendapat bawa menjaga hubungan ekonomi dengan Jepang pada pertumbuhan langkah yang strategis. Dalam hubungan ekonomi antara Jepang dan Tiongkok adalah investasi dalam bidang teknologi, yang mana Tiongkok merupakan salah satu pasar produksi Jepang. Jepang merupakan kekuatan ekonomi dunia dan mengandalkan pendapatannya dari sektor perdagangan serta investasi (https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/2014/20140228009-news.html / di akses pada 20 Juli 2015).

Tiongkok secara historis sangat mandiri dalam hal energi karena merupakan negara yang kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam cadangan sumber-sumber bahan bakar. Sejak tahun 1950-1960-an Tiongkok berhasil mencapai tahap energi *self-sufficent* yang merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi konsumsi energi sendiri yang diwarisi sejak masa

Mao Zedong. Kekayaan energi Tiongkok membuatnya menjadi negara pengekspor dan pemasok minyak mentah terutama bagi Jepang. Sebaliknya Jepang merupakan negara yang dalam kemajuan teknologi sangat baik di dunia sehingga dalam kerjasama dalam bidang teknologi dengan Tiongkok sering dilakukan oleh Jepang. Dalam hal ini kedua negara saling membutuhkan satu sama lain (http://www.researchgate.net/publication/228202919_China%27s_Energy_Security_with_Special_Reference_to_Japan / diakses pada 25 Juli 2015).

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk melakukan pertemuan bilateral kedua negara disela-sela pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pada 2014 yang diselenggarakan di Beijing, setidaknya memiliki tiga alasan yang mendasar bagi terwujudnya pertemuan antara Shinzo Abe dan Xi Jinping ini yaitu:

1. Jepang-Tiongkok sepakat bahwa keduanya saling membutuhkan untuk mencapai kepentingan bersama yang strategis dan berkeinginan untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan kedua negara.
2. Jepang-Tiongkok menyadari akan kesulitan politik yang dialami oleh kedua negara termasuk masalah sejarah kedua negara yang menyangkut permasalahan Kuil Yasukuni dan kunjungan Perdana Menteri Jepang ke kuil tersebut.
3. Jepang-Tiongkok menyadari akan perbedaan pandangan terhadap konflik Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan menemukan cara mengekspresikan perbedaan kedua negara mengenai konflik Senkaku/Diaoyu sehingga dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil yang signifikan tentang

penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu yang telah lama baik Jepang dan Tiongkok sama-sama mengklaim kepulauan tersebut (http://www.eastasiaforum.org/2014/10/26/china-japan-relations-creating-a-sea-of-peace-cooperation-and-friendship/ Diakses pada tanggal 27 Juli 2015).

Kedua negara ini juga bersepakat untuk membangun kerjasama dengan menggunakan lima pilar sebagai landasan kerjasamanya. Lima pilar tersebut yaitu: peningkatan rasa saling percaya dibidang politik, mempromosikan *People-to-people exchange* dan pertukaran budaya serta persahabatan antara rakyat Jepang dan Tiongokok, peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan, berkontribusi kepada kawasan Asia Pasifik, dan kontribusi terhadap resolusi isu-isu global.

Peningkatan rasa saling percaya di bidang politik dilakukan dengan kunjungan yang dilakukan oleh pemimpin negara yang satu ke negara lain, mengadakan pertemuan termasuk pada kesempatan konferensi internasional, meningkatkan kunjungan tingkat tinggi di bidang keamanan, serta saling memahami nilai-nilai dasar dan universal yang umumnya diterima oleh masyarakat internasional dan memahami budaya bersama Jepang dan Tiongkok yang telah terjalin sejak masa lampau.

Jepang dan Tiongkok melakukan pembicaraan tentang isu-isu maritim, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi sengketa kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Tiongkok Timur dan langkah ini bisa membantu dan membuka jalan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Wakil

Perdana Menteri Tiongkok Wang Yong berbicara bahwa pengusaha Jepang dalam berinvestasi di Tiongkok sekitar 200 pengusaha.

Wang mengatakan kepada delegasi Jepang bahwa Tiongkok berusaha untuk melanjutkan diskusi tentang ekonomi dengan Jepang harus segara dilaksanakan karena ini bisa membuka peluang untuk Jepang-Tiongkok untuk mempererat hubungannya dalam bidang ekonomi.

Hal ini dapat mengurangi intensitas yang menegangkan sebelumnya terjadi dalam keamanan di Laut Tiongkok Timur dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang dan Tiongkok (http://www.wsj.com/articles/japan-and-china-resume-high-level-maritime-talks-1411575886 / di akses pada 26 Juli 2015).

4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas & Reabilitas

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian atau informan sangatlah penting bahkan kunci utama. Sebab, subjek penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam suatu penelitian, serta mendukung peneliti untuk dapat memperoleh data atau informasi yang nantinya data tersebut diolah, dianalisis, dan disusun siapa yang berhak memberikan informasi yang relavan sehingga mampu menjawab pertanyaan peneliti.

Penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penelusuran data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertent, metode dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, sutar kabar, majalah, dokumen dan

sebagainya serta wawancara dengan melakukan studi lapangan ke lembaga-lembaga terkait. Untuk menguji validitas dan reabilitas data yang telah diperoleh peneliti mengakses situs-situs resmi pemerintah dan lembaga serta mengkonfirmasi ke lembaga-lembaga terkait yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan , yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai penguat dalam informasi yang didapat serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sumber informasi untuk permasalahan tentang sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Dalam menguji validitas dan Reabilitas mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti yang berupa gambaran umum tentang sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Peneliti melakukan konfirmasi terhadap permasalahan tentang sengketa antara Jepang dan Tiongkok di Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia serta mengakses situs-situs resmi seperti, *Ministry Of Foreign Affairs Japan,* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, situs Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), serta situs-situs terkait permasalahan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yaitu, *Taipei Times*, *Ashashi Simbun*, *The NewYork Times*, *The China Times*, *China Daily,* dan semua informasi dipublikasikan secara resmi melalui situs-situs tersebut yang sudah di uji kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan maka situs tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

Data-data berupa gambaran tentang penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu antara Jepang-Tiongkok, sejarah yang terjadi pada saat sengketa tersebut mulai memanas, mengenai pandangan internasional terhadap sengketa

yang terjadi antara Jepang-Tiongkok, serta mengetahui bagaimana respon Tiongkok atas pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang pada 2012.

Salah satu data yang diperolah peneliti adalah sumber-sumber informasi yang jelas dari Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia yang dimana pihak pemerintah Jepang menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan wilayah teritorial Jepang, sehingga Jepang tidak merasa ada Sengketa antara Jepang-Tiongkok dalam kasus Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Data yang diperoleh peneliti yaitu beberapa jurnal dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Untuk menguji validitas dan reabilitas data tersebut peneliti melakukan konfirmasi wawancara dengan Ibu Dra. Awani Irewati, MA sebagai peneliti kajian internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Dalam hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi tentang sejarah Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu serta mengetahui peta politik Jepang dan Tiongkok dalam sengketa kepulauan yang dimana beliau memberikan pandangannya terhadap sengketa kepulauan tersebut untuk memberikan pelajaran Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Peneliti juga melakukan penelitian kepada Badan Pengkajian & Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri yang dimana mendapatkan sumber informasi serta data-data melalui kliping yang didapatkan BPPK yang peneliti kelola dalam penelitian Senketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu sehingga menjadi tambahan referensi untuk memenuhi data-data penelitian.

4.2 Analisa Penelitian & Pembahasan

4.2.1 Kronologi Pembelian Kepulauan Senkaku/Dioayu Oleh Jepang

Pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu dari Kurihara pada September 2012 menjadi titik permasalahan tentang terjadinya konflik yang besar dalam Laut Tiongkok Timur. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Osamu Fujimura mengatakan pengalihan kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dari tangan pribadi ke negara untuk bisa mengendalikan situasi secara stabil dan damai. Keputusan ini diambil oleh Perdana Menteri Yoshihiko Noda, sebelumnya pada Aprlil 2012 Gubernur Tokyo Shitaro Ishihara mengumumkan bahwa pemerintah Tokyo akan membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu tetapi pemerintah Pusat Jepang menganggap penting dalam hal kepemilikan kepulauan tersebut sehingga pemerintah Jepang membeli kepulauan Senkaku/Diaoyu dan menganggap ini sebagai nasionalisasi aset Jepang.

Pemerintah Jepang mengatakan pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu mencapai 2,05 miliar Yen atau sekitar Rp.260 miliar untuk tiga pulau di kawasan Kepulauan Senkau/Diaoyu. Pemerintah Jepang mengatakan pengalihan ini hanya kepemilikan pulau yang merupakan bagian dari wilayah Jepang, dipindahkan dari pribadi ke negara dan sebaiknya tidak menimbilkan masalah dengan negara lain (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/09/120910_japan_senkaku.shtml / di akses pada 26 Juli 2015).

Shintaro Ishihara dikenal sebagai nasionalis dari *Liberal Demokratic Party* (LDP), pengumuman tentang pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh pemerintah Tokyo menjadi tantangan bagi Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda. Jika pemerintah Tokyo membeli kepulauan tersebut maka Ishihara

dimungkinkan akan membangun instalasi dan meningkatkan pemakaian kepulauan. Noda yang berasal dari *Democratic Party of Japan* (DPJ) tidak menyukai keputusan Ishihara yang dapat menyerang Noda pada saat pemilihan Perdana Menteri berikutnya karena gagal dalam mempertahankan teritorial Jepang.

Pada awal November 2012 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah menjadi subjek dalam yurisdiksi perjanjian kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada peningkatan perselitihan dan tensi dalam hubungan Jepang-Tiongkok. Dalam pertemuan dengan presiden Obama di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda secara jelas dan resmi untuk kesekian kalinya mengajak Tiongkok ke Mahkamah Internasional guna memecahkan permasalahan sengketa kepulauan ini dan Tiongkok mengambil sikap untuk menolak ajakan dari Jepang dan menganggapnya tidak perlu karena Kepulauan Senkaku/Diaoyu jelas-jelas milik Tiongkok yang telah direbut oleh Jepang.

Sengketa antara Jepang dan Tiongkok bisa dikatakan sebagai kendaraan nasionalisme Jepang dan Tiongkok yang dimana kedua negara menaruh perhatian serius terhadap sengketa tersebut mengingat permasalahan tersebut berkaitan dengan harga diri dari nasional mereka dan bagian dari kedaulatan yang harus di perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam hukum internasional memberikatan kebebasan kepada tiap negara yang bersengketa untuk memilih cara dan prosedur penyelesaian. Dalam proses

penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu menurut peneliti dapat menggunakan cara penyelesaian secara politik sebab penyelesaian secara politik akan lebih melindungi kedaulatan negara. Dalam penyelesaian secara Arbitrase atau Mahkamah Internasional cenderung mengikat dan permasalahan dalam koneksi dari perlindungan hukum.

Diplomasi yang dilakukan Jepang dengan cara mengirimkan utusan untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Tiongkok untuk mencapai kepentingannya dalam Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. diplomasi juga dilakukan dengan cara kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh pemimpin pemerintah yaitu melalui Japan-Tiongkok Summit Meeting dan Japan-Tiongkok *Foreign Minister Meeting*. Dalam pembicaran mengenai sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dilakukan oleh Jepang terhadap Tiongkok, yaitu: pembicaraan mengenai kerjasama eksplorasi sumber daya alam, kerjasama dalam hal *serch and Rescue* (SAR), pembicaraan dan penegasan mengenai posisi masing-masing negara, serta protes Jepang terhadap kebijakan Tiongkok dengan kasus sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/index.html /di akses pada 26 Juli 2015).

4.2.2 Respon Tiongkok atas Pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu

Keputusan Jepang untuk membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu meningkatkan ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok. Puluhan ribu warga Tiongkok turun ke jalan utama di sejumlah kota besar Tiongkok. Aksi demonstrasi warga Tiongkok bahkan sempat menjurus kepada kekerasan dengan

merusak restoran dan kendaraan buatan Jepang. Demonstran memperotes keputusan Jepang yang telah membeli tiga Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Tiongkok Timur. Unjuk rasa besar-besaran di Tiongkok juga bertepatan dengan peringatan Insiden Mukden yang terjadi pada 18 September 1931, saat itu pasukan Jepang mengebom rel kereta api di dekat kota Mukden di Manchuria. Peristiwa yang menjadi awal invasi Jepang terhadap Tiongkok yang menyisakan sakit hati masyarakat Tiongkok terhadap penjajahan yang pernah dilakukan oleh Jepang.

Masyarakat Tiongkok mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok harus bertindak tegas terhadap Jepang sebagaimana yang pernah dilakukan Mao Zedong. Menurut pengunjuk rasa pemerintah Tiongkok harus mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu dari tangan Jepang. Merespon demonstrasi yang dilakukan masyarakat Tiongkok, pengusaha Jepang menutup pabrik dan toko mereka di Tiongkok. Produsen mobin Honda dan Toyota Motor berhenti beroperasi setelah pengunjuk rasa menghancurkan toko-toko mereka. Para pengunjuk rasa mengepung kedutaan besar Jepang di Beijing, mereka melemparkan botol, mengibarkan bendera Tiongkok, menyanyikan slogan-slogan anti-Jepang dan merusak beberapa jendela bangunan Kedutaan Besar Jepang. Unjuk rasa tidak hanya di Beijing tetapi terjadi juga di Shanghai dan Shenzen. Beberapa pengunjuk rasa ditangkap polisi karena rusuh dan merusak (http://edition.cnn.com/2012/09/15/world/asia/china-japan-islands/ Diakses pada 26 Juli 2015).

Pada 23 November 2013 pemerintah Tiongkok memberlakukan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), pemberlakuan ADIZ tersebut terkait

sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang berada dalam Laut Tiongkok Timur. Kepulauan Senkaku/Diaoyu masuk dalam wilayah Tiongkok yang dimana Tiongkok berhak untuk mendapatkan laporan atas penerbangan yang melintasi udara wilayah Kepulauan Senkaku/Diaouyu. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok mengingat status Jepang yang telah melakukan tindakan yang agresif dalam wilayah Laut Tingkok Timur (http://edition.cnn.com/2013/11/25/world/asia/china-japan-island-explainer/ di akses pada 27 Juli 2015).

Pertentangan yang terjadi dalam wilayah Laut Tiongkok Timur merupakan peran yang dilakukan masing-masing aktor yang mempengaruhi kepentingan nasionalnya. Jepang dan Tiongkok sangat memerlukan penguasaan atas wilayah Laut Tiongkok Timur karena memiliki sumber daya alam yang besar. Dalam sebuah wilayah yang memiliki sumber cadangan yang besar maka hal itu menjadi bagian dari jantung sebuah negara dan harus dapat di pertahankan kedaulatannya dengan kekuatan yang besar sekalipun.

4.2.3 Langkah-langkah Mengamankan Kepentingan Nasional Dalam Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu

4.2.3.1 Kepentingan Jepang

Dalam laporan *United Nations Economic Commisson for Asia and Far East* (UNICAFE) wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan tempat yang memiliki sumber daya alam yang besar. Abad ke 21 ini membuat perkembangan perindustrian dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini semua negara baik itu negara besar maupun kecil sangat bergantung dalam hal minyak

dan gas alam untuk mewujudkan kemajuan dan kelangsungan hidup negaranya Jepang merupakan negara yang maju dalam hal teknologi, produksi Jepang dalam hal transportasi dan teknologi sangat besar. Setelah bencana Fukusima Jepang menghentikan operasi di semua pembangkit nuklir dan ini mengakibatkan pergeseran dalam kebutuhan energi Jepang terhadap minyak dan gas alam. Jepang merupakan konsumen minyak dan gas terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok

Hal ini membuat Jepang tertarik untuk memanfaatkan sumber daya tersebut seperti gas dan minyak untuk kepentingan industri, transportasi, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Sebelum pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang dari Tatsuhiro Koga Kepulauan senkaku/Diaoyu tersebut telah dimanfaatkan oleh Koga untuk memanfaatkan sumber daya tersebut seperti kerang laut, pupuk alam dan bulu-bulu burung. Selain itu koga telah menginvestasikan modal dalam jumlah yang besar untuk mengembangkan usahanya di Kepulauan Senkaku/Diaoyu. dalam pengembangannya Koga melakukan banyak perubahan seperti membangun perumahan, waduk, dermaga, sistem irigasi, dan penanaman pohon atau reboisasi dan semenjak itu kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak lagi menjadi pulau yang tidak berpenghuni karena telah banyak orang-orang jepang yang berimigrasi ke Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Pemerintah Jepang menjelaskan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu berada ditangan Jepang sebelum maupun di saat Kepulauan Senkaku/Diaoyu berada ditangan Amerika Serikat pasca kekalahan Jepang. Tiongkok tidak pernah

memperlihatkan keberatannya atas kepemilikan Jepang terhadap Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

4.2.3.1 Kepentingan Tiongkok

Saat ini Tiongkok adalah negara pengkonsumsi minyak terbesar no 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Tiongkok merupakan negara yang saat ini sedang mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, apalagi kemiliterannya. Dan untuk melakukan penelitian serta melakukan uji coba senjatanya Tiongkok membutuhkan bahan bakar minyak yang sangat banyak, dan hal ini telah didasari oleh para pemimpin Tiongkok bahwa dalam beberapa tahun kedepan ketersedian dalam bidang minyak dan gas akan menurun dan akan menyebabkan kelangkaan dalam negeri, ini menjadi pembahasan Tiongkok untuk dapat mendapatkan cadangan tersebut agar kelangkaan di Tiongkok tidak terjadi seperti apa yang telah dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok sebelumnya.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki posisi yang strategis dalam jalur laut internasional. Tiongkok melihat kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai keuntungan dalam lokasinya yang yang strategis, dimana wilayah ini dapat dijadikan sebagai basis pertahanan militer Tiongkok terhadap Jepang mengingat posisinya yang berdekatan dengan Jepang. hal ini membuat Tiongkok untuk memperjuangkan Kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk dapat dimiliki secara keseluruhan.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu juga dapat menjadi geostrategis Tiongkok karena pada Dinasti Ming merupakan penanda navigasi selama pelayan Tiongkok ke Jepang. Kepulauan Senkaku/Diaoyu dianggap sebagai batas penting untuk pertahanan lepas pantai Tiongkok. Penguasaan eliminasi atas sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah menggiring Tiongkok untuk menetapkan zona identifikasi di atas wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu. hal ini dalam rangka mengingatkan internasional bahwa kawasan tersebut masih dalam persengketaan dan bukan sepenuhnya telah menjadi hak Jepang atas apa yang telah dilakukan dalam menasionalisasikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Kapal-kapal nelayan Tiongkok sering mengambil ikan dalam wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu, ini merupakan salah satu pendapatan masyarakat Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dalam beberapa kejadian yang tidak diketahui oleh nelayah Tiongkok dimana Kapal nelayan Tiongkok telah terlibat konflik dengan pasukan patroli Jepang yang berjaga-jaga dalam wilayah sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menyebabkan nelayan Tiongkok di usir ketika sedang mengambil ikan.

4.2.4 Prospek Penyelesaian Kepulauan Senkaku/Diaoyu Pasca Pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu Tahun 2012

Hubungan antara Jepang dan Tiongkok dalam beberapa dekade memiliki hubungan yang tidak baik dengan di perlihatkannya ketidak percayaan dan permusuhan atau bahkan konflik kekerasan. Beberapa permasalahan masa lalu sampai sekarang sering menjadi objek perselisihan kemananan dalam hubungan Jepang-Tiongkok, permasalahan tersebut tidak hanya untuk negara-negara yang

terlibat namun memiliki implikasi untuk negara-negara tetangga bahkan masyarakat internasional. Beberapa isu kemanan dalam Asia Timur terus menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan antara Jepang dan Tiongkok terutama dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu

Dalam prospek penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok telah dilakukan beberapa kali untuk dilakukannya penyelesaian tersebut. Jepang mengumpulkan fakta-fakta sejarah tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dimana Jepang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan wilayah teritorial Jepang yang dimana dalam bukti yang dipaparkan Jepang berpendapat Tiongkok tidak memiliki bukti yang valid dalam kepemilikan kepulauan tersebut.

Upaya diplomasi yang dilakukan baik Jepang maupun Tiongkok telah dilakukan seperti *"Sea Of Peace Cooparation and Friendship"* sebagai dasar Jepang dan Tiongkok dalam mengadakan perjanjian bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Laut Tiongkok Timur. Proses awal diplomasi dalam perjanjian bersama antara Jepang dan Tiongkok adalah membentuk dan mengadakan penelitian letak strategis dalam pengelolaan bersama yang dapat dicapai oleh Jepang dan Tiongkok.

Perbedaan paham garis perbatasan di Laut Tiongkok Timur antara Jepang dan Tiongkok hingga kini belum mencapai kesepakatan bersama. Walaupun baik Jepang dan Tiongkok sama-sama meratifikasi Konvensi PBB tentang *United Nation Convention Law of the Sea* (UNCLOS) tetapi mereka membangun pemahaman sendiri tentang garis pangkal laut tersebut. dalam pengambilan garis

tengah untuk pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antar kedua negara untuk memcapai solusi yang adil.

Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tahun 2014, Jepang dan Tiongkok bertemu untuk mendiskusikan tentang persengketaan kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Tiongkok Timur. Dalam pertemuan tersebut Tiongkok meminta kepada Jepang untuk mengakui atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah milik Tiongkok baik secara bukti-bukti maupun secara teritorial Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah milik Tiongkok. Jepang memberikan respon bahwa Jepang tidak akan membuat kompromi atau negosiasi dalam kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu karena dalam pandangan Jepang kepulauan tersebut masuk dalam teritorial Jepang yang termasuk dalam pulau Okinawa.

Pada Februari 2015 Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan berencana untuk bertemu untuk membahas masalah isu-isu regional. Rencana tersebut akan diselenggarakan pada 21 dan 22 Maret 2015 di Seoul Ibu Kota Korea Selatan, namun akhirnya hal tersebut tidak dapat terlaksana dan sampai sekarang tidak ada berita tentang rencara pertemuan tersebut.Pertemuan yang direncanakan oleh Korea Selatan tersebut sebelumnya telah direncanakan pada tahun 2008, namun pertemuan tersebut tidak terlaksana karena memanasnya hubungan Tiongkok-Jepang akibat pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang.